

## **TRANSKRIP**

# **Fahri Hamzah**

## **Kajian Pengembangan Wawasan - Jumat (26/12/2025)**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kawan-kawan di mana pun Anda berada.

Pada malam hari ini kita akan melanjutkan percakapan kita tentang pilar-pilar kebangsaan.

Dan pada malam hari ini kita ingin membahas satu topik yang menarik, yaitu melihat kebangsaan sebagai sebuah sistem. Melihat kebangsaan dalam demokrasi dan kewarganegaraan dalam satu tarikan napas.

Sebab, salah satu keterjebakan kita dalam berbangsa dan bernegara adalah kita terlalu sering memandang kebangsaan dan kenegaraan secara parsial.

Kita dalam banyak momen di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara sering berada dalam tarik-menarik, baik pada pendulum kiri ataupun pendulum kanan. Semuanya salah.

Dan karena itu kita harus kembali dalam satu perspektif yang utuh.

Kita di Partai Gelora harus membangun tradisi dan membiasakan diri untuk melihat negara bangsa dalam perspektif yang luas. Karena itulah yang menyebabkan kemudian kita selalu bisa bersikap adil dengan keadaan dan dengan kenyataan yang ada.

Kita tahu bahwa kalau belajar dari sejarah bangsa Indonesia, hal itulah yang secara terus menerus terjadi. Ketika bangsa kita terseret untuk menilai negara dari pribadi atau seseorang dan juga kemudian muncul ketergantungan yang berlebihan kepada individu, kepada orang per orang.

Kultus individu inilah yang kemudian di dalam sejarah itu menciptakan suasana yang nyaris menyeret kita kepada lubang kehancuran.

Padahal yang sebenarnya harus kita lihat adalah—sekali lagi—negara sebagai sebuah sistem.

Apalagi setelah kita sepakat dan komit untuk memilih demokrasi sebagai jalan atau cara kita mengelola kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka sekali lagi kita harus menoleh kepada sistem.

Keterpukauan kita kepada orang per orang itu harus kita kurangi, kecuali karena orang itu membawa pikiran-pikiran besar untuk menyelamatkan sistem kita.

Itulah yang terus-menerus terjadi dan karena itulah kita berangkat dari sistem masa-masa lampau di zaman-zaman kerajaan yang dianggap terlalu menggantungkan diri kepada orang per orang, menuju zaman republik, dan kita memasuki republik yang demokratis, karena kita ingin memindahkan semua kekuasaan itu tidak melekat pada individual tapi melekat pada sistem.

Nah demikianlah pula kita, cara kita melihat negara hari-hari ini.

Ketika kita berbincang tentang negara, itu tidak boleh kita hanya berbincang tentang satu orang, tentang individu. Tetapi harus kita mentradisikan diri melihat apa sebenarnya yang terjadi apabila seseorang atau individu itu merupakan bagian dari sistem.

Sehingga boleh jadi orang-orang yang baik apabila hidup di dalam sistem yang buruk, maka orang yang baik itu akan berubah dan menjelma menjadi orang-orang jahat. Dan sebaiknya kadang-kadang ada orang yang kita lihat pas-pasan ya, tetapi karena sistemnya kuat, sistemnya baik, maka orang itu juga bertransformasi menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang kuat.

Nah, sekali lagi ini adalah, tantangan demokratisasi pada semua level dan terutama pada cara kita berpikir dan terutama cara berpikir dari kaum intelektual dan khususnya kader-kader partai.

Kembali kepada perspektif sejarah yang saya katakan tadi, misalnya zaman kerajaan.

Zaman kerajaan itu, tentu yang namanya raja, raja adalah segala-galanya. Dia menguasai segala-galanya.

Pada dirinya melekat kekuasaan eksekutif, di mana raja adalah seorang eksekutor, tapi pada dirinya juga melekat kekuasaan legislatif, karena raja adalah pembuat undang-undang. Dan pada saat yang bersamaan, raja juga adalah seorang judikator atau judikatif karena dirinya juga adalah yang membuat peradilan atau pengadilan. Jadi raja itu adalah eksekutif, dia menjalankan pemerintahan, dia adalah legislatif yang membuat aturan, dan dia juga adalah judikatif yang mengadili. Sehingga dalam perkembangan waktu muncullah tuntutan untuk memisahkannya.

Tetapi kita tahu di zaman sejarah Indonesia, peralihan menuju demokrasi itu diantarai oleh lahirnya kolonialisme dan imperialisme, yang juga tentu tendensinya adalah otoriter. Karena dalam tradisi masyarakat seperti itu, ada orang yang dikuasai dan ada orang yang menguasai. Ada yang dijajah dan ada yang menjajah. Orang yang menjajah memiliki tanpa batasan hak, tanpa batasan kekuasaan, sementara orang yang dijajah terbatas segala-galanya.

Kalau kita ingin menyaksikan pola dari masyarakat imperialisme dan kolonialisme atau penjajahan di zaman sekarang, itu masih ada di dunia ini, yaitu penjajahan bangsa Israel kepada bangsa Palestina. Di mana bangsa yang menjajah memiliki

segala-galanya, sementara bangsa yang dijajah tidak saja dijajah fisiknya, tapi juga dijajah narasinya. Perjuangan mereka untuk membela diri disebut sebagai terorisme dan seterusnya.

Demikianlah ketidakadilan penjajahan yang pernah kita alami lebih dari 300 tahun di bumi kita Indonesia ini.

Nah, setelah itulah kemudian atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan setelah itu terjadi agresi militer. Sehingga ada yang mengatakan kemerdekaan penuh kita baru kita dapatkan pada tahun 1949.

Kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan yang luar biasa untuk melepaskan diri dari tirani penjajahan.

Dan kemudian kita masukilah era yang disebut dengan orde lama. Tapi di dalam orde lama juga telah terjadi godaan kepada penguasa orde lama untuk lagi-lagi berpindah dari membangun sistem kepada membangun kekuasaan individu, kejayaan individu, dan kemutlakan kekuasaan individu.

Pada awal-awal orde baru selalu demikian dalam sejarah bangsa Indonesia, kita komit dengan demokrasi, kita menyelenggarakan pemilu yang bebas, kita membangun institusi-institusi negara yang menjadi penjamin pelayanan dan kebebasan publik. Tetapi ujung-ujungnya, setelah lebih dari dua puluh tahun, terjadilah konsentrasi kekuasaan.

Saya sering mengatakan sebelum masuk ke fase orde baru bahwa usia bangsa Indonesia hidup dalam otoritarianisme itu jauh lebih banyak daripada usia hidup dalam demokrasi.

Kita hidup dalam demokrasi yang sedikit-sedikit, tapi traumanya adalah kita selalu berakhir dengan kekuasaan yang mutlak.

Ketika orde baru lahir melawan tirani eh komunisme sebagai otoritarianisme baru, dielu-elukan sebagai eh pembebasan dan lahirnya demokrasi. Lahirlah keinginan untuk menyelenggarakan pemilu dan sebagainya.

Tapi tidak lama, datanglah yang disebut dengan demokrasi terpimpin, yang berujung kepada kendali elite yang luar biasa kepada rakyat dan rakyat yang dirampas kebebasannya juga luar biasa. Elite tidak boleh salah, rakyat hanya menjadi objek.

Sekali lagi, ini semua terjadi karena kita beralih dari perhatian kita dari sistem kepada individual dan kesenangan kita untuk melihat orang-orang hebat dan orang-orang besar yang selalu ada dalam kekuasaan dan kita damba-dambakan.

Karena itulah, sekali lagi, sebagai tradisi demokrasi di negara kita sekarang ini, kita harus membiasakan diri melihat gambar besar dan keseluruhan dari sistem.

Jangan lupa misalnya dalam demokrasi itu ada trias politika. Trias politika itu harus berjalan sejalan dan seiring dan harus sama kuat. Cabang-cabang kekuasaan itu harus sama-sama kuat sehingga bisa sama-sama saling mengawasi dan saling mengontrol.

Eksekutif memang paling kuat karena dia langsung dipilih oleh rakyat, satu orang, dan mengakumulasi kekuasaan dan uang dan kewenangan yang luar biasa. Tapi dalam demokrasi sebenarnya, legislatif juga kuat.

Dan itulah yang sekarang ini harus kita tantang agar para legislator itu menunjukkan tajinya, menunjukkan kemampuan dan kekuatannya untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Jangan mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat ini tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan, sebagai oposisi terhadap pemerintah.

Sebab, apabila mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan, nanti rakyat melihat kalau begitu pemerintah kami awasi sendiri. Dan kalau rakyat sudah bilang pemerintah kami awasi sendiri, itu kan artinya yang mengawasi itu banyak sekali dan suara yang kisruh dan ricuh itu akan banyak sekali.

Kenapa? Karena fungsi perwakilan dan lembaga pengawasan yang kita pilih itu tidak berjalan.

Jadi jangan kita salahkan adanya keriuhan di mana-mana, termasuk keributan sosial media, apabila lembaga perwakilan yang berfungsi mengawasi pemerintahan justru tidak berjalan dan mereka diam saja dan kita tidak tahu mereka mengerjakan apa.

Karena pada dasarnya waktu kita memilih mereka, kita memilih mereka sebagai pengawas pemerintahan, sebagai oposisi terhadap pemerintah.

Nah, kalau kita menelisik eh-- apa namanya, eh-- lebih jauh apa yang terjadi, tentu kita melihat adanya kegagalan partai politik.

Karena partai politik tidak membiarkan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, bahkan langsung dipilih oleh rakyat, adalah serepresentasi yang apa namanya, yang kuat, yang diberikan kebebasan dan juga hak-hak imunitas untuk mengatakan dan berbicara apa pun bebas, selama itu di dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan dan menjalankan tugas sebagai pengawas pemerintahan, sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintahan.

Jadi, kamar legislatif adalah kamar yang kuat. Cabang legislatif adalah cabang yang kuat, baik DPR maupun DPD.

DPR mewakili rakyat melalui partai politik dan DPD bisa dikatakan mewakili selain manusia, dia mewakili pohon yang dirusak, dia mewakili tambang-tambang, tanah-tanah yang dikeruk oleh tambang, dia mewakili penghancuran alam, dia mewakili sungai, mewakili laut, mewakili udara dan mewakili seluruhnya dari apa yang sebenarnya tidak punya hak bicara di dalam pemerintahan.

Karena itulah anggota dewan dan anggota DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, harus sama-sama kritis dan mengkritik jalannya pemerintahan itu. Dan ributnya mereka, riuhnya mereka, justru itu yang konstitusional.

Sementara rakyat Indonesia sebenarnya ingin hidup tenang. Mereka ingin menjalankan hidupnya sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai pekerja pemerintahan, sebagai pekerja swasta dan sebagai apa pun.

Karena setelah dipilih, mereka seharusnya menyibukkan diri dengan fungsinya masing-masing di cabang kekuasaannya masing-masing.

Demikian juga di kamar judikatif, kita menginginkan peradilan yang independen, peradilan yang tidak bisa diintervensi, peradilan yang tidak bisa diganggu, dan tentunya yang paling penting adalah baik legislatif maupun judikatif adalah mereka yang bersih dan bebas dari korupsi.

Tapi kalau hari-hari kita menyaksikan korupsi di lembaga judikatif dan juga korupsi di lembaga legislatif, bagaimana mereka mau menyelenggarakan pengawasan yang independen dan bagaimana cara mereka bisa untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dari kepentingan-kepentingan yang non kepentingan mencari hukum dan keadilan.

Nah, inilah cara kita melihat gambar besar dari keseluruhan persoalan yang kita miliki di negara kita ini. Bahwa suatu bangsa, suatu negara, harus dipandang dalam satu kesatuan yang utuh, ya.

Demokrasi itu ada anasir di dalamnya yang merupakan nilai-nilai, dan logika, dan ide, dan gagasan yang ideal. Demokrasinya mengajarkan transparansi, keterbukaan. Demokrasi mengajarkan pentingnya rule of law, demokrasi yang menegakkan sistem yang terbuka, peradilan yang apa namanya, yang transparan, yang meminta agar kekuasaan dijalankan secara profesional, secara terbuka.

Demokrasi menganut nilai-nilai itu, tapi di sisi lain, demokrasi menganut prosedur-prosedur yang harus dijalankan secara baik, ya.

Ada aturan di dalam cabang kekuasaan eksekutif, ya, tentang keterbukaan informasi publik, tentang keharusan untuk profesional dan transparan. Ada juga aturan-aturan yang di dalam demokrasi legislatif, misalnya, aturannya adalah check and balance mechanism, gitu. Dan juga tentunya peraturan di dalam cabang kekuasaan judikatif yang menganut prinsip independensi peradilan.

Semua ini kita mulai supaya kita bisa memandang semuanya secara utuh.

Saya ingin mengambil contoh dari cara kita melihat presiden dari waktu ke waktu di negara kita. Di negara kita ini, sering kita ujung-ujungnya menyalahkan presiden.

Zaman Orde Lama, kita mendewa-dewakan Presiden Soekarno. Tapi kemudian setelah Presiden Soekarno berhenti, kita memaki-makinya bahkan menghilangkan jejaknya dari dalam sejarah.

Lalu bergantilah Presiden Soeharto, demikian juga Presiden Soeharto didewa-dewakan, luar biasa, disanjung-sanjung, diberikan gelar yang begitu banyak. Tapi begitu Presiden Soeharto berhenti, lalu kita memaki-makinya seolah-olah tidak ada harganya dan tidak pernah ada jasanya.

Kita bersyukur kemarin Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan kepada Pak Harto karena eh juga hal yang sama diberikan kepada para pemimpin sebelumnya.

Yang harusnya orang sudah berhenti tetap ada jasanya. Meskipun dia punya kesalahan tapi dia punya jasa.

Tapi waktu Pak Harto berkuasa, dielu-elukan luar biasa, tapi berhenti dimaki-maki luar biasa.

Demikian juga presiden yang setelahnya terutama yang memimpin agak lama.

Waktu itu pernah Pak SBY diganggu. Sekarang kita masih menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi itu diganggu luar biasa, padahal waktu dia berkuasa dielu-elukan luar biasa seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik daripada Pak Jokowi.

Saya sendiri pernah mengalami karena pernah mengkritik Pak Jokowi sebagai anggota dewan, saya sempat didemonstrasi sama orang bahkan diacung-acungkan pedang di suatu tempat, karena dianggap mengkritik Pak Jokowi adalah suatu tindakan membenci pemimpin, padahal saya cuman menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif.

Tapi kemudian begitu Pak Jokowi apa berhenti, tiba-tiba semua orang seolah-olah eh menyerang Pak Jokowi seolah-olah tidak ada jasanya. Padahal beliau memiliki jasa juga bagi kemajuan dan pertumbuhan bangsa kita, terlepas dari ada banyak juga kekurangan-kekurangannya.

Demikian juga kita tidak mau di masa yang akan datang ya, kita melebih-lebihkan pemimpin yang akan datang tapi kemudian pada saat yang bersamaan kita bersikap sadis karena setelah pemimpin itu berhenti kita membencinya.

Nah, gejala ini saya anggap sebagai salah satu yang disebabkan oleh kelemahan kita dalam memandang negara sebagai sebuah sistem.

Bahwa dalam negara itu ada banyak komponen di dalamnya. Kita sendiri sebagai rakyat juga adalah komponen yang harus terus menerus mendidik diri supaya kita tidak salah pilih. Karena begitu kita salah pilih, akhirnya juga kita yang menyesal dan kita yang marah.

Tapi kita harus melatih diri kita untuk memantau dan membaca siapa yang akan memimpin secara lebih baik pada saat yang sama, sistem mana yang akan diperbaiki dan kita perbaiki dan siapa dari pemimpin-pemimpin itu yang menawarkan perbaikan sistem secara baik.

Jelas dalam hal ini Partai Gelora adalah partai yang ingin mengajak kita semua untuk memperbaiki sistem. Termasuk di dalamnya apabila ada sistem yang kita anggap harus kita evaluasi.

Kita termasuk yang membuka pintu bagi diskusi penyempurnaan sistem politik, mekanisme pemilu, sistem ketatanegaraan dan lain-lainnya.

Bahkan menurut saya diskusi tentang amandemen kelima untuk menyempurnakan konstitusi juga tetap harus kita buka. Karena apabila dalam tiga puluh tahun terakhir setelah amandemen satu sampai keempat, terdapat masih banyak masalah yang harus kita perbaiki ke depan, maka kita layak pun harus mendiskusikan perbaikan-perbaikan itu ke depan, dan selanjutnya nanti kita akan menemukan satu sistem yang lebih ideal dan lebih solid.

Kita pernah dalam histeria dan euforia yang luar biasa menuntut demokrasi yang kita kemudian perjuangkan dengan segala cara, sehingga kita memiliki demokrasi seperti hari ini. Tetapi ada banyak hal yang rasanya perlu kita tinjau ulang dan perlu kita perbaiki. Dan karena itu mari kita berdiskusi secara baik, secara tenang dalam rangka kita menyempurnakan apa yang sudah kita miliki ini.

Sebab sebuah sistem terutama konstitusi dan undang-undang itu adalah karya manusia. Dia terbuka untuk didiskusikan dan terbuka untuk dibahas perbaikan dan penyempurnaannya ke depan.

Dan kita Partai Gelora tidak boleh absen dari exercise gagasan-gagasan besar ini supaya kita menuju suatu yang suatu bentuk yang lebih ideal.

Partai Gelora memprediksi terjadinya guncangan-guncangan besar secara geopolitik dan kita memiliki ketua umum yang berbicara dimana-mana tentang guncangan geopolitik itu. Dan karena itulah kita juga harus mempersiapkan perangkat kenegaraan dan ketatanegaraan serta perangkat pemerintahan yang siap dan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan besar itu.

Kita juga harus menyiapkan masyarakat kita dalam dunia yang penuh disrupsi, dalam teknologi yang penuh dengan perang algoritma dan sengketa yang dimanipulasi, untuk menyiapkan masyarakat kita untuk tidak menjadi bagian dan menjadi korban dari hal-hal yang tidak kita mengerti yang datang dari luar.

Ini sebenarnya semuanya memerlukan kecerdasan dan pencerdasan.

Itulah sebabnya masyarakat demokrasi sesungguhnya adalah masyarakat yang mengutamakan kecerdasan dari rakyatnya.

Masyarakat demokrasi adalah masyarakat pembelajar dan kita semua harus terbiasa belajar.

Kami di Partai Gelora menyelenggarakan kegiatan seperti ini adalah dalam rangka mengajak kader untuk mendiskusikan apa pun yang kita lihat hari-hari, yang menjadi kenyataan. Ada banyak fenomena yang terus terang belakangan ini harus menjadi objek kajian kita.

Termasuk, saya ingin menyampaikan satu fakta yang kita lihat secara nyata bahwa pemerintahan Pak Prabowo ingin berbuat banyak, memberikan makan kepada anak dan ibu hamil, membangun sekolah bagi rakyat miskin yang disebut dengan Sekolah Rakyat, membangunkan rumah bagi masyarakat, memberikan pengecekan kesehatan gratis bagi semua yang berulang tahun, dan menanggung biaya-biaya hidup masyarakat yang paling bawah.

Tapi di zaman sosial media seperti sekarang, kita menyaksikan rupanya ada penerimaan yang kurang pas dan tidak ditangkap secara baik oleh sebagian dari masyarakat kita, terutama mereka yang bersambung dengan kegiatan di media sosial.

Maka oleh karena itulah kita di Partai Gelora tetap harus menjadi kekuatan yang positif, yang menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Partai Gelora sebagai bagian dari pemerintahan merasa bahwa pemerintahan ini ingin berbuat baik sebagaimana dari awal kita tahu bahwa Presiden Prabowo memang ingin berbuat baik dan ingin memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban lama dari bangsa kita yang belum diselesaikan.

Beliau memberi makan kepada anak-anak. Dan beliau juga membangunkan kampung haji bagi umat Islam, khususnya sebagai kemandirian atau sebagai kerinduan lama dari umat yang ingin kalau pergi haji harganya bisa lebih rendah, tinggal di tempat yang lebih familiar dan nyaman serta melakukan hal-hal yang rutin tetapi mendatangkan kekhusyukan dan kesyahduan di dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah.

Semuanya ingin dikerjakan oleh Presiden Prabowo, tapi rupanya memang ada masalah di dalam penangkapan atau pemaknaan ini di dunia maya.

Marilah kita secara cermat, cermat memantau semua situasi ini, dan kita mempelajarinya tentang jangan sampai realitas baru yang disebut sosial media yang menciptakan disrupsi ini membuat kita menjadi tidak harmonis, membuat bangsa kita menjadi tidak rukun dan tertib, membuat kita menjadi gampang sekali untuk saling tidak menghormati dan saling meniadakan jasa dan perjuangan.



Memang sebenarnya apa pun kerja kita adalah kerja yang ikhlas, yang lillahi ta'ala. Tapi pada dasarnya, masyarakat memang punya hak untuk menilai dan masyarakat juga berhak dan punya kebebasan untuk menilai.

Kadang-kadang masalahnya bukan pada apa yang kita kerjakan, tapi cara kita mengerjakannya dan bagaimana kita memastikan agar masyarakat menangkap baik dari semua niat baik dan rencana-rencana baik yang akan diselenggarakan ke depan.

Inilah yang saya bisa sampaikan dan saya mohon maaf karena malam ini tidak bisa mengadakan tanya jawab dan dialog karena acara yang akan saya ikuti selanjutnya. Tapi saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dan catatan untuk menjadi bahan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang.

Dan sesi ini adalah sesi yang sangat penting tentang kewarganegaraan dalam perspektif demokrasi dan kelembagaan negara, sehingga tema ini cukup aktual dengan situasi kita hari-hari ini.

Tetap belajar, tetap kritis, tetaplah ingin terus punya ilmu pengetahuan. Itulah ciri-ciri daripada kader Partai Gelora Indonesia.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.